

SKRIPSI
ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) UNIT LALABATA RILAU KABUPATEN SOPPENG

ERMA
105730386912



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2018

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT.BANK RAKYAT
INDONESIA (BRI) UNIT LALABATA RILAU
KAB. SOPPENG**

SKRIPSI

Oleh

ERMA

105730386912



**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu, ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Q.S Alam Nasyrh : 6-7)

“Fikirkanlah hal-hal yang paling hebat, dan engkau akan menjadi terhebat. Tetapkan akal pada hal tertinggi, dan engkau akan mencapai yang tertinggi”.

“Syukuri apa yang kamu raih hari ini, besok tingkatkan atau paling tidak pertahankan karena hidup adalah anugerah.”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang menyayangi dan yang senantiasa selalu mendoakanku, terutama kepada kedua orang tuaku.

Terima kasih untuk doa, motivasi dan kesabarannya yang selalu memberikanku semangat setiap harinya dan mendoakanku disetiap shalatnya.

Terima kasih atas doanya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Pengennadian Intern terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng"

Nama Mahasiswa : Erma
No. Stambuk/NIM : 105730386912
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada 31 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 September 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.AK..CA
NIDN : 0916096601

Pembimbing II

Ismail Rasulong, SE..MM
NBM : 903 078

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE..MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE..M.Si..Ak.CA.CSP
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama, **Erma NIM : 105730386912**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0009/2018 M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Muhammadiyah Makassar.

25 Dzulhijjah 1439 H
Makassar,
6 September 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM

(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

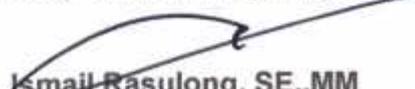
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Aرسال, SE. MM, Ak.CA

2. Ismail Rasulong, SE.,MM

3. Andi Arman, SE., M.Si.A.,CA

4. Naidah, SE.,M.Si

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 90307

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erma

Stambuk : 105730386912

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : “Analisis Pengendalian Intern terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng.”

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2018

Yang Membuat Pernyataan,

ERMA

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM : 903 078

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Analisis Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng”** dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian skripsi ini sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan seperti sekarang ini karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M Si. Ak CA selaku Ketua Jurusan beserta Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen jurusan akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. Ansyarif SE.,M.Si.,Ak dan bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak

membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

6. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Kedua orang tuaku, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk semua bimbingannya, nasehatnya dan dukungannya hingga penulis bisa jadi seperti sekarang, buat kakak serta keluargaku yang selama ini banyak memberikan bantuan. Terima kasih atas segala motivasinya.
8. Buat teman-teman akuntansi 8 angkatan 2012 khususnya Nurjanna, Kumala Sari, Nurul Azisah, Kasmawati, Siti Ratih Amelia, Misbahuddin, Sahrial Akmal, Ridwan dan Jamaluddin yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Buat teman-teman pondok Dilah dan Sainal yang telah membantu penulis selama ini.
10. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

ERMA, 10573 03869 12. “Analisis Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng” Dibimbing Bapak Ansyarif Khalid dan bapak Ismail Rasulong Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk Sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dan serta bahan informasi tentang pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat pada bank yang sama. Penelitian dilaksanakan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode analisa yang menjelaskan pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Lalabata RilauKabupaten Soppeng.

Penulis telah melakukan analisis dan evaluasi mengenai pengendalian intern terhadap penyaluran kredit. Sistem pengawasan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau dilakukan selama 2 (dua) bulan. Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikitnya nasabah yang terkena kredit macet.

Kata kunci :pengendalian intern, sistem penyaluran kredit.

ABSTRACT

ERMA, 10573 03869 12. "Analysis of Internal Control of the Distribution of People's Business Loans at PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lalabata Rilau Unit Soppeng District" Mr. Ismail Rasulong Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Ansyarif Khalid and Mr. Ismail Rasulong Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.

This study aims to serve as reference material and library material for those who wish to conduct research with the same object and as well as information material on internal control over the distribution of people's business loans at the same bank. The research was conducted at PT Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau, Soppeng Regency by using descriptive analysis method, which is an analysis method that explains internal control at PT. Bank Rakyat Indonesia unit Lalabata Rilau Soppeng Regency.

The author has conducted an analysis and evaluation of internal controls on credit distribution. Credit supervision system at PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau is conducted for 2 (two) months. In its implementation it has been good enough, but needs to be improved again because there are still few customers who are exposed to bad credit.

Keywords: internal control, credit distribution system.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bank	7
B. Pengendalian Intern	10
C. Pengertian Kredit	16
D. Pemberian Kredit	19
E. Hubungan Pengendalian Intern terhadap Penyaluran Kredit	20
F. Peneliti Terdahulu	22
G. Kerangka Pemikiran	27

H. Hipotesisi	29
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Teknik Pengumpulan Data	30
C. Populasi dan Sampel	31
D. Metode Analisis	31
E. Defenisi Operasional	32
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia	33
B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia	35
C. Struktur Organisasi BRI Unit Lalabata Rilau	35
D. Deskripsi Jabatan	36
E. Kegiatan Bank Rakyat Indonesia	39
F. Persyaratan untuk Memperoleh Kredit	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kredit Usaha Rakyat	43
B. Persyaratan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat	46
C. Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau	48
D. Sistem Pengawasan Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau	55
E. Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakat Indonesia Unit Lalabata Rilau	57
F. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau dalam Kredit Bermaslah	59
G. Manfaat hasil Penelitian	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mapping Jurnal.....	22
Tabel 5.1 Data Penerima KUR	45
Tabel 5.2 Kolektibilitas Kredit	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	36
Gambar 5.1 Tahap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	48
Gambar 5.2 Flowchart Permohonan Kredit	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit dalam istilah perekonomian merupakan suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Bila tidak ada jangka waktu maka bank akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran. Besar kecilnya dana dalam kondisi apapun akan tetap terbatas sementara kebutuhan akan kredit akan terus menuntut selama manusia berusaha menjalankan usahanya. Permintaan akan suplai kredit akan terus mengalir ke bank apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap saat. Keadaan tersebut tentu harus selalu dipikirkan dan di perhatikan oleh bank kapan, bagaimana, dan berapa yang diberikan oleh bank untuk suplai kreditnya

Salah satu tugas pokok bank adalah memberikan kredit (pinjaman), kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya. Kredit untuk tujuan kegiatan produktif dan dapat diberikan dengan kredit jangka panjang, kredit jangka menengah serta kredit jangka pendek. Bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan (kredit) dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu bank memperoleh bunga, komisi atau provinsi dari penjualan kredit dan pemberian jasa itu. Dengan demikian bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas penyaluran kredit dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu. Kredit mempunyai kedudukan yang istimewa, terutama pada negara yang sedang berkembang sebab antara volume permintaan akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat. Selain itu pendapatan bunga dari

kredit merupakan komponen yang dominan dibandingkan jasa-jasa perbankan lainnya

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jadi, suatu perjanjian kredit mengandung unsur kepercayaan dan unsur waktu.

Adapun prosedur pengajuan KUR yaitu:

1. Pemohon dapat mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan cara melampirkan dokumen seperti legalitas usaha (jika ada), perizinan usaha, catatan keuangan serta sebagainya.
2. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha yang berdasarkan permohonan.
3. Apabila menurut Bank, usah memang layak maka Bank akan menyetujui permohonan KUR.
4. Bank dan pemohon lalu menandatangani Perjanjian Kredit.
5. Pemohon wajib untuk membayar atau mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.

Dokumen yang diperlukan adalah:

1. Identitas diri nasabah, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan lain-lain.
2. Legalitas usaha, seperti adanya akta pendirian, akta perubahan.
3. Catatan pembukuan ataupun laporan keuangan.

4. Copy bukti agunan jenis usaha yang memang sudah Anda jalankan dan Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan dari Bank, seperti sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya.

Menyalurkan dana masyarakat tersebut, sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya, oleh karena itu diperlukan pengelolaan kredit yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern, agar dana yang terdapat dari para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan pengendalian intern kredit bagi bank, dalam hal ini adalah untuk: Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak, dan melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.

Uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar bagi bank, namun kredit merupakan kegiatan dan jasa bank yang penuh dengan risiko yang cukup rumit maka dari itu. Bank harus memiliki suatu sistem pengendalian dalam proses penyaluran kredit. Menurut mulyadi(20013:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi ,metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dengan

adanya pengendalian intern terhadap penyaluran kredit dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan terhindar dari praktek penyaluran kredit yang tidak sehat.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan/agunan. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Presiden RI.

Bank merupakan tempat yang paling utama dalam perkreditan, bank merupakan sumber bagi perusahaan untuk meminjam dana guna memajukan perusahaannya. Salah satu bank yang penyedia KUR dan banyak di minati perusahaan dalam perkreditan adalah Bank BRI. Salah satu kegiatan yang terdapat pada Bank BRI yaitu menghimpun dana dan membeli dana, memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Bank Indonesia. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana maka dilakukan pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak manajemen Bank BRI.

PT. Bank BRI (Persero), Tbk juga memerlukan adanya suatu pengendalian intern guna tercapainya tujuan perusahaan secara menyeluruh. Namun cicilan kredit seharusnya disetorkan ke bank oleh pihak nasabah, tidak disetorkan hal ini menyebabkan kerugian pada bank. Terjadinya penyelewengan cicilan kredit tersebut sebagai akibat kurangnya pengendalian kredit terhadap

penyaluran kredit karena *ineffisiensi* dari pimpinan perusahaan, di mana pimpinan perusahaan mempunyai kelemahan dalam pengelolaan perusahaan, kelemahan dalam kontrol ataupun kesalahan dalam penentuan *policy* perusahaan. Maka dari itu PT Bank BRI harus memiliki pengendalian intern yang handal dan dapat dipercaya dalam mengelola kredit. Adapun masalah yang sering dihadapi bank dalam penyaluran kredit usaha rakyat yaitu, kesadaran nasabah dalam hal pembayaran kredit, dan ketepatan waktu pembayaran. Hal ini menjadi acuan dasar dalam melakukan pengendalian intern terhadap penyaluran kredit supaya dapat meminimalisir terjadinya tunggakan pembayaran oleh nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ” **Analisis Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Maka masalah relevan penulis identifikasi terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengendalian Intern pada Bank BRI(Persero), Tbk. Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng
2. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Intern atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI(Persero), Tbk. Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng

C. Tujuan Penelitian

Menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng
2. Untuk mengetahui peranan pengendalian intern dalam penyaluran kredit usaha rakyat pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diterapkan untuk memberikan manfaat bagi penulis, perusahaan yang bersangkutan dan juga bagi pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Memperoleh tambahan ilmu mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap penyaluran kredit.

2. Bagi Bank BRI (Persero), Tbk

Penulis mengharapkan bahwa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penegndalian intern terhadap penyaluran kredit.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian akan dapat sebagai masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti kembali tentang masalah-masalah perkreditan dan pengendalian interen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Disamping menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lain.

Pengertian bank menurut B.N. Ajuha yang diterjemahkan oleh Malayu S.P Hasibuan(2002:2) dalam bukunya “Dasar-dasar Perbankan” menyatakan bahwa“Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik”.

Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yaitu“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali

dalam bentuk pinjaman kredit untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1. Fungsi Bank

Menurut Susilo dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Lain, menyatakan bahwa:"Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services.*" (2000;6). Adapun penjelasan dari pernyataan tersebut adalah :

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan bank adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana, memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa.

c. *Agent of Services*

Disamping kegiatan menghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan jasa-jasa perbankan yang lain pada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitanya dengan perekonomian masyarakat secara umum.

2. Usaha Pokok Bank

Menurut Kasmir(2005;3)"Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah : menghimpun dana, menyalurkan dana, serta memberikan jasa lainnya, Bank pada dasarnya merupakan perantara antara penabung dengan peminjam, dimana usaha bank ini didasarkan atas empat hal pokok, yaitu :

- a. Bank menghimpun dana dari penabung yang masing-masing nilainya relatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan peminjam yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit.
- b. Bank dalam menghimpun dana menyelenggarakan bentuk-bentuk simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan, dan sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan penabung yang bervariasi sehingga ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam oleh peminjam dari bank yang bersangkutan.
- c. Dana yang disimpan oleh para penabung kepada bank umumnya bersifat likuid. Karena itu, penabung dapat dengan mudah mencairkannya sesuai dengan bentuk tabungannya. Untuk menjaga likuiditas, bank diharuskan menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas atau giro wajib minimumnya. Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhitungkan jumlah uang beredar agar seimbang dengan volume perdagangan. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan nilai tukar yang relatif stabil.
- d. Bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur dan sektor-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga risiko yang dihadapi bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil. Berdasarkan keempat usaha pokok bank di atas, maka bank disebut juga Lembaga Kepercayaan.

B. Pengendalian Intern

Perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan saja, pimpinan yang sering kali juga merupakan pemilik perusahaan tersebut, dapat mengikuti dan mengawasi secara langsung kegiatan semua karyawannya. Namun sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan, manajemen perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan manajemen melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya.

Di lain pihak, manajemen dituntut bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen membutuhkan alat bantu yaitu beberapa kebijakan dan prosedur yang disebut pengendalian. Pengendalian ini umumnya adalah sistem pengendalian intern yang memadai dan dapat diandalkan.

Adanya pengendalian intern ini merupakan tanggung jawab dari manajemen. Suatu pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Jika kesalahan dan penyelewengan terjadi, maka hal ini akan dapat ditetapkan dan diatasi dengan cepat.

1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian pengendalian intern menurut Azhar (2002:103) "Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui : efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya,

ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.” Sedangkan pengertian pengendalian intern menurut Marshall dan PaulJohn(2004;229) menyatakan bahwa ”Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset,memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efesiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.”

Daapat ditarik beberapa kesimpulan pengendalian intern sebagai berikut :

- a. Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan.
- b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya.
- c. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
- d. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi(2002 : 180)"Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : (1) Keandalan informasi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi". Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut Marshall dan PaulJohn(2004;229)"Tujuan pengendalian intern adalah untuk : (1) Menjaga aset, (2) Memebrikan informasi yang akurat dan andal, (3) Mendorong dan memeperbaiki efisiensi, (4) Mendorong kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan."

Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian internal dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian internal ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efesiensi dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

3. Komponen Pengendalian Intern

Penelitian *Committe of Sponsoring Organization* (COSO) menyatakan bahwa pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalain, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

COSO menyajikan langkah yang signifikan atas definisi pengendalian internal yang dahulu terbatas atas pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian yang menagani tujuan yang luas dari dewan komisaris dan pihak manajemen. Lima komponen pengendalian internal menurut COSO yang disajikan oleh Marshall dan PaulJohn(2004;231) adalah sebagai berikut :

”Lima komponen pengendalian internal COSO yang saling berhubungan :

1. Lingkungan pengendalian
2. Aktivitas pengendalian
3. Penilaian risiko
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.” .

4. Pengendalian Intern Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi dunia perbankan, karena penghasilan bank yang paling dominan berasal dari bunga kredit. Disamping itu kredit juga merupakan bisnis yang sangat berisiko, karena ada kemungkinan kredit yang telah diberikan tidak tertagih. Untuk itu dalam penyaluran kredit yang diajukan oleh nasabah perlu adanya sebuah pengendalian intern, agar tujuan dari penyaluran kredit itu dapat tercapai dan bank terhindar dari kerugian dan proses penyaluran kredit yang tidak sehat. Menurut Tjukria P.Tawaf” menyatakan bahwa “Pengendalian intern terhadap penyaluran kredit terdiri atas : aspek pengendalian intern kredit, proses aktivitas pengendalian kredit, serta unsur-unsur pendalian intern kredit.” (2005;271)

Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian intern terhadap penyaluran kredit kepada nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Aspek pengendalian intern perkreditan

Beberapa pokok utama dalam pengendalian kredit adalah :

- 1) Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit dan taksasi agunan.
- 2) Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang disetujui oleh direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan, ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit, ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan, informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi kredit dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.
- 3) Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menagani permasalahan kredit.
- 4) Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut.

Salah satu aspek terpenting guna terjaminnya sistem pengendalian di atas adalah terpeliharanya dengan baik file kredit nasabah di bank. File kredit yang disimpan di bank berisi berbagai jenis data tergantung jenis kreditnya. Data pokok yang harus ada untuk setiap jenis kredit adalah surat perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

b. Proses aktivitas pengendalian intern perkreditan

Proses aktivitas pengendalian kredit harus dilaksanakan secara terus menerus oleh manajemen bank agar tercipta perkreditan yang sehat. Proses pengendalian kredit mencakup :

1) Pengendalian pada saat perencanaan

Pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit, segenap data dan informasi yang diterima dari calon nasabah dibandingkan satu dengan yang lainnya. Pihak bank meneliti dan membandingkan semua aspek dari data itu, baik kebenaran, keabsahan dan kewajaran. Bila dari evaluasi awal terjadi keraguan dari banyak hal, maka dari awal pihak bank sudah dapat memutuskan bahwa kredit tidak dapat diproses lebih lanjut. Apabila semua sudah memadai maka bank bisa memproses lebih lanjut. Proses selanjutnya adalah analisis kredit.

2) Pengendalian pada saat pelaksanaan

Keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit tertuang dalam Memo Usulan Kredit. Biasanya syarat tersebut menyangkut jaminan, agunan kredit dan pengikatan serta penguasaannya oleh bank, kewajiban-kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan realisasi kerja usahanya. Dengan demikian, proses pengendalian disini adalah membandingkan dan mengevaluasi apakah syarat itu telah dan dapat dipenuhi oleh nasabah. Apabila ada hal yang belum atau mungkin tidak dapat dipenuhi, langkah antisipasi perlu dilakukan.

3) Pengendalian pada saat pengendalian

Pengendalian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabah. Oleh sebab itu permasalahan

harus dapat diatasi secara dini agar tidak semakin luas dan kompleks. Pada saat kredit berjalan, aktivitas usaha nasabah disampaikan ke bank sesuai syarat yang telah ditetapkan oleh komite kredit. Setiap saat bank memperhatikan laporan-laporan nasabah untuk melihat apakah target-target usaha nasabah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Untuk itu bank perlu membandingkan, mengevaluasi secara terus menerus. Apabila terjadi deviasi dari rencana maka bank perlu melakukan langkah-langkah koreksi secara dini

C. Pengertian Kredit

Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini disebut juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit.

Pengertian kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:87) "Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati". Sedangkan pengertian kredit menurut Kasmir (2004;102) "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang

1. Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita membicarakan tentang kredit maka termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam penyaluran kredit menurut Kasmir(2005;104) "Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan. Oleh sebab itu sebelum kredit dikururkan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dari nasabah.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah satu

tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (di atas tiga tahun).

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Penyaluran kredit oleh bank mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan dari penyaluran kredit bagi bank adalah untuk mencari keuntungan, membantu nasabah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi. Sedangkan fungsi dari penyaluran kredit itu sendiri untuk meningkatkan daya guna uang dan barang, mendorong dan mempelancar produksi dan konsumsi. Fungsi dan tujuan bank ini pada akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

3. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dan yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Jenis-jenis kredit menurut Kasmir(2005;109)” Secara umum jenis kredit jika dilihat dari berbagai segi antara lain : dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan

kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi jaminan dan dilihat dari segi sektor usaha.”

D. Pemberian Kredit

a. Pengertian Pemberian Kredit

Menurut Dahlan (2004;165) “Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.”

b. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur penyaluran kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit.

Prosedur penyaluran kredit menurut Rachmat (2004;91) adalah :

1. Persiapan kredit
2. Analisis kredit
3. Keputusan Kredit
4. Pelaksanaan dan administrasi kredit
5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur.

Secara umum tahapan-tahapan/prosedur tahapan penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan berkas-berkas
- 2) Penyidikan berkas pinjaman
- 3) Wawancara awal
- 4) Pemeriksaan ke lapangan

- 5) Wawancara II
- 6) Keputusan kredit
- 7) Penandatanganan perjanjian kredit
- 8) Realisasi kredit
- 9) Penyaluran kredit

E. Hubungan Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran kredit

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit. Masalah utama yang dihadapi oleh bank adalah ketergantungannya yang besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah yang dipinjam secara kredit. Maka pihak bank membutuhkan suatu pengendalian intern yang memadai dalam kegiatan pemberian kreditnya.

Pengendalian intern yang memadai harus didukung oleh adanya komponen-komponen pengendalian yang meliputi : Lingkungan Pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian intern. Dengan tercapainya tujuan pengendalian intern maka akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan penyaluran kredit yang sehat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Z. Dunil (2005;208) menyatakan bahwa "Setiap bank harus mempunyai pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek penyaluran kredit yang tidak sehat

Jadi, dengan adanya pengendalian intern maka penyaluran kredit atau pembiayaan diharapkan dapat mencapai tujuannya seperti adanya kesinambungan operasional perusahaan dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi. Oleh karena itu pengendalian intern berperan dalam menunjang kelancaran penyaluran kredit

F. Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti Terdahulu	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nyoman Trisna Hurawati (2014)	Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Kanaya	Analisis deskriptif kualitatif	Prosedur pengendalian internal dalam pemberian kredit telah memadai. Ghal ini dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip 5C dengan cukup baik sebelum dicairkannya suatu kredit
2.	Pemi Rosalina Hadi (2015)	Sistem pengendalian Internal pada Bank Danamon Cabang Kembang Japur Surabaya	Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Upaya yang dilakukan dengan adanya prosedur-prosedur yang ada untuk melengkapi persyaratan pemberian kredit yang ada pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya akhirnya meminimalisir resiko adanya kredit macet
3.	Mohammad Muzamil	Analisis	Studi kasus pada	Kebijakan manajemen bank secara garis besar

	(2015)	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit pada BRI Kota Samarinda	perusahaan	kebijakan manajemen bank dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu bagian menghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana
4	Pramuris Prismawati (2014)	Analisis Sistem Pengajuan Kredit dan Pengendalian Intern pada PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta	Penilaian kualitatif	Pengajuan yang diterapkan PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Surakarta terdiri atas beberapa prosedur permohonan kredit, prosedur persetujuan permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit. Meminimalkan resiko terjadinya kredit macet
5.	Clara Niken Dwi Haryani (2014)	Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Pemberian Credit	Studi kasus melakukan penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas	Sistem pengendalian intern pada sistem pemberian kredit di CUBG KK Yogyakarta sebagian besar dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi,

		Union Barero Gratia KK Yogyakarta		pemantauan sudah sesuai dengan komponen pengendalian intern menurut COSO
6.	Cindy Aditya (2015)	Analisis Efektifitas Pengendalian Intern atas Prosedur Kredit pada PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta	Desain penelitian berupa studi deskriptif	Proses pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan prosedur. Dalam pemberian kredit umum kepada nasabah telah didukung oleh penerapan sistem pengendalian
7.	Amirah Ahmad (2013)	Tinjauan Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank Mega Cabang Makassar	Kualitatif, yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif	Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mega Cabang Makassar terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit . sistem pemberian kredit telah didukung oleh penerapan sistem internal yang sangat efektif

8.	Munawarah (2014)	Peran Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri	Metode deskriptif eksploratif. Jenis deskriptif yang digunakan adalah pendekatan studi kasus	Pengendalian internal yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI), Kediri dan sistem pengendalian internal telah efektif
9.	Ruzannna Amanina (2013)	Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Inten pada Proses Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Mandiri Cabang	Penelitian secara langsung dengan mendatangi objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui pihak-pihak yang	Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah memenuhi unsur pengendalian seperti nilai integrasi yang ditunjuk melalui kode etik pada manual produk kredit mikro, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang ditunjuk melalui struktur organisasi

		Majapahit Semarang	terkait dalam pemberian kredit	
10.	Anniasa Handayani (2013)	Sistem Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya	Metode deskriptif	Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian internal. BNI memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga menerapkan persyaratan tertentu

Tabel 2.1 Mapping Jurnal

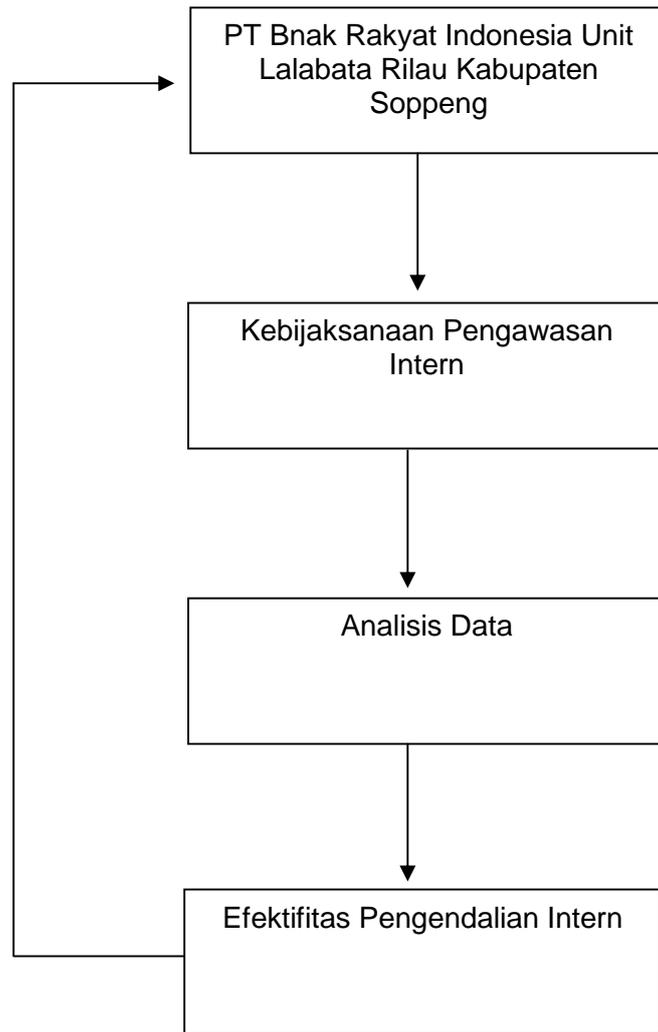
G. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60) “Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. ”Berikut adalah gambar kerangkapikir yang digunakan peneliti dalam penelitian ini :

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Soppeng merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bagi pengusaha kecil dan mengevaluasi sejauhmana penggunaan kredit.

Pengawasan intern terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng, diketahui dengan menjelaskan kebijaksanaan pengawasan kredit yang bersangkutan. Sedangkan, efektifitas Pengawasan Terhadap Penyaluran Kredit, dapat diketahui dengan membandingkan penyaluran kredit.

Adapun kerangka pikir yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam bentuk skhema sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan dapat dirumuskan hipotesis adalah “Pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng dari rumusan masalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian/Obyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:13) "Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)." Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT Bank BRI (Persero), Tbk Unit Lalabata Rilau Kab.Soppeng.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang Pengendalian Intern atas pemberian kredit usaha rakyat pada PT Bank BRI (Persero), Tbk Unit Lalabata Rilau Kab.Soppeng dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai tanggal 07 Agustus sampai 07 Oktober 2017.

B. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014:224) mengemukakan bahwa "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data". Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data melalui keterangan secara tertulis yang merupakan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang penyaluran kredit PT Bank BRI (Persero), Tbk Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng.

2. Wawancara, yaitu suatu percakapan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya-jawab yang terencana. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengendalian intern dan penyaluran kredit PT Bank BRI (Persero), Tbk Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2014:61) berpendapat bahwa "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian adalah keseluruhan data tentang penyaluran kredit PT Bank BRI (Persero), Tbk Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:62) "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi." Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah data tentang penyaluran kredit PT Bank BRI (Persero), Tbk Unit Lalabata Rilau Kab. Soppeng tahun terakhir yakni 2016.

D. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran mengenai data atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi yang

diselidiki peneliti dan objek yang diteliti terpisah, proses penelitian dilakukan melalui pengukuran dengan bantuan alat yang baku dan objektif.

E. Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014:63) mendefinisikan variable adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.” keputusan pemberian kredit, penulis menentukan operasionalisasi variabel sebagai berikut :

1. Variabel Indipenden (Variabel X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variable X adalah “Peranan Pengendalian Intern”.

2. Variabel Dipenden (Variabel Y)

Variabel dipenden adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, maka yang menjadi variabel Y adalah “pemberian kredit”.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/ pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Akibat situasi perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden NO. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor.

Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Bank Rakyat Indonesia sudah berdiri sejak lama dan tahu mengenai masalah perbankan di Indonesia, dan yang merupakan Bank milik Negara dan Bank BRI yang mempunyai Unit Kerja atau Cabang terbanyak di Negara ini. Karena BRI selalu peduli terhadap rakyat miskin yang masih banyak tinggal di Daerah Pedesaan dan tidak mengutamakan orang kaya saja. Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak membedakan mana orang kaya mana orang miskin, semuanya dimata BRI sama saja.

Di setiap pelosok Negara ini, semua cabang BRI selalu memberikan simpan-pinjam kepada para nasabah yang selalu membutuhkan dana untuk keperluan nasabahnya.

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1. Visi

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah semua nasabah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank terbaik di Indonesia ini.

2. Misi

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang seoptimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

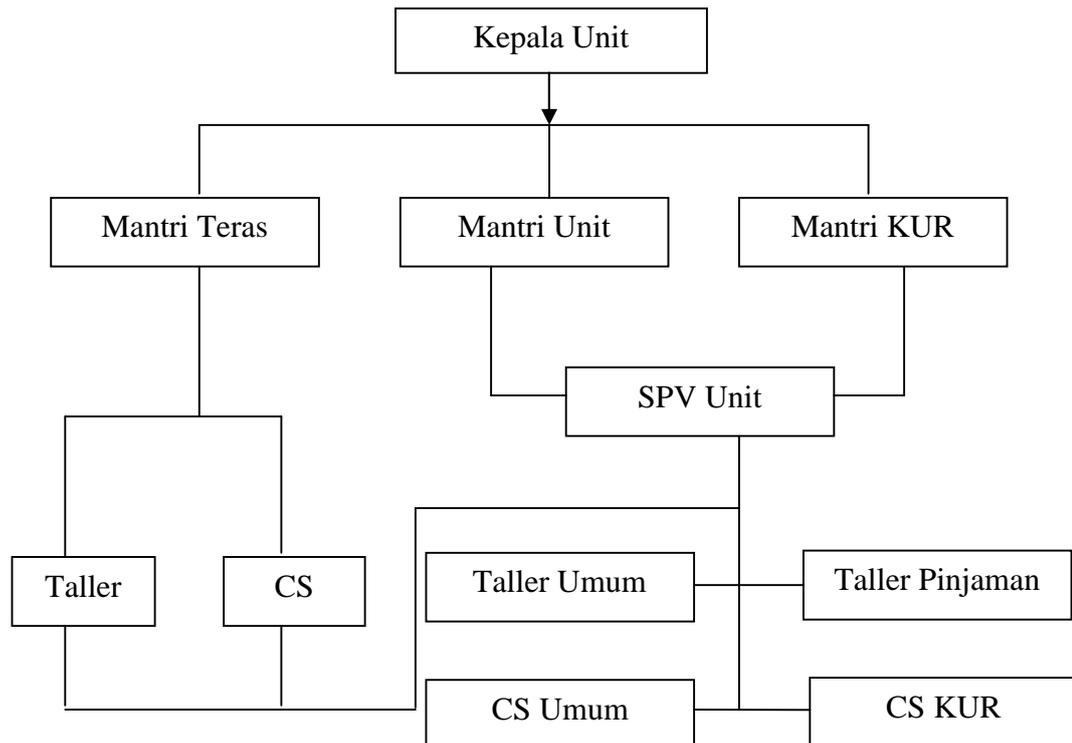
C. Struktur Organisasi BRI Unit Lalabata Rilau

Struktur organisasi formal pasti memiliki struktur organisasi merupakan suatu wadah atau fungsi dalam manajemen yang menetapkan dan membagi tugas pekerjaan yang dilakukan antara unsur-unsur organisasi. Sehingga memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan.

Dengan adanya organisasi, manajemen dapat mengadakan kegiatan yang diciptakan dari suatu susunan organisasi sehingga secara formal diman setiap pejabat dari fungsi-fungsi dalam organisasi dapat melaksanakan

fungsi sebagai wadah serta alat untuk mewujudkan tujuan yang dialami dan telah disetujui bersama.

Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng.



Gambar 4.1

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Soppeng Unit Lalabata Rilau

D. Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting dalam mencapai tujuan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau yang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Intinya menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing personil pada setiap bidang yang ditempati. Tugas masing-masing antara lain:

1. Kepala BRI Unit

Melaksanakan fungsi manajemen di BRI Unit dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai RKA dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro.

Tugas :

- a. Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai target.
- b. Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang :

- a. Memutuskan permintaan KUR, KUPedes, dan BRIInet sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- b. Memutus biaya/ memfiat produksi.
- c. Memfiat pencarian/ penarikan simpanan.
- d. Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.

2. Mantri

Tugas :

- a. Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya).
- b. Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- c. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari dicairkan sampai lunas.

Wewenang :

- a. Memprakarsai permintaan pinjaman
- b. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman

3. Asisten Mantri KUR

Tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan aktivitas penagihan secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah.

4. Customer Service

Tugas :

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan BRI.
- b. Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit
- c. Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank.

5. Teller

Tugas :

- a. Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun over booking, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem yang jelas dan prosedur perasional BRI.

- b. Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pwtngambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
- c. Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- d. Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang yang diterima.

E. Kegiatan Bank Rakyat Indonesia

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada adalah:

- a. Simpanan Giro (Demand Deposit)
- b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
- c. Simpanan Deposito (Time Deposit)

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Sebelum dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat

keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi :

- a. Kredit Investasi,
- b. Kredit Modal Kerja,
- c. Kredit Perdagangan,
- d. Kredit Produktif,
- e. Kredit Konsumtif.

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya (Services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, seperti keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa yang ditawarkan meliputi :

- a. Kiriman Uang (Transfer)
- b. Kliring (Clearing)
- c. Safe Deposit Box
- d. Bank Notes
- e. Letter of Credit (L/C)

- f. Cek Wisata (Travellers Cheque)
- g. Menerima setoran-setoran
- h. Melayani pembayaran-pembayaran
- i. ATM

F. Persyaratan untuk Memperoleh Kredit

Kredit-kredit yang dapat dibiayai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Presero) Tbk. Cabang Soppeng sebagai berikut :

1. Mempunyai foto copy KTP / SIM dan Kartu Keluarga dan berdomisili dalam Negeri.
2. Mempunyai surat-surat izin usaha (SITU, SIUP, TDP, TDR, Surat Izin Industri dan lain-lain)
3. Untuk kredit diatas Rp. 50 juta harus menyerahkan NPWP, SPT dan lampirannya (laporan keuangan)
4. Usaha telah berjalan/ beroperasi minimal 2 tahun.
5. Usaha tidak dilarang oleh pemerintah.
6. Usaha cukup prospektif.
7. Mempunyai barang jaminan (sertifikat tanah, IMB dan PBB).
8. Tidak tercatat dalam daftar hitam Bank Indonesia
9. Apabila seorang pegawai harus mendapat izin dari atasannya yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikannya.
10. Menyerahkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) minimal 2 tahun terakhir.
11. Untuk kredit diatas Rp. 1 milyar harus sudah berbentuk badan hukum (PT. CV. Koperasi, Yayasan).

12. Untuk perohonan Non KUK (diatas Rp. 350 juta) harus menjadi nasabah (giro, deposito dan tabungan) minimal 6 bulan baik di Bank Rakyat Indonesia maupun Bank lain.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberian kredit (khususnya pemberian kredit pada segmen retail) Bank Rakyat Indonesia menetapkan sistem management perkreditan yang diperlakukan khusus untuk pengelolaan debitur retail. Sistem pengelolaan dibidang perekonomian saat ini maupun dimasa yang akan datang dan diharapkan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat berjalan lancar, efisien, dan selaras dan teknologis.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kredit Usaha Rakyat

Sebelum penulis membahas tentang prosedur penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau, penulis akan memaparkan pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja atau investasi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafon* kredit sampai dengan Rp. 500 juta dan dijamin oleh perusahaan penjamin.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKMK dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif”.

UMKMK merupakan usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum bankabel. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKMK pada umumnya kurang, maka sebagian *discover* dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari *plafond* kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKMK antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan)

Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian KOOordinasi Bidang Perekonomian, Serta Bank Indonesia.

Penggolonga KUR sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

- a. KUR s/d Rp. 500.000.000
- b. KUR (Mikro) s/d Rp 5.000.000
- c. KUR *Lingkage Program*

No	Nama	Jenis Usaha	Lama Usaha
1	LN	Warung sembako	2 tahun
2	AS	Pedagang makanan	8 tahun
3	PD	Pedagang sayur dan buah	6 tahun
4	PH	Pedagang makanan	12 tahun
5	NN	Warung sembako	7 tahun
6	SN	Pedagang makanan	8 tahun
7	KJ	Pedagang makanan	9 tahun
8	MN	Pedagang sayur dan buah	6 tahun
9	ML	Penyewaan sound sistem	2 tahun
10	UB	Warung sembako	8 tahun
11	KML	Warung sembako	2 tahun
12	MLN	Konter HP	2 tahun
13	EDS	Pedagang kambing	4 tahun
14	ENN	Pedagang makanan	6 tahun
15	LKN	Konter HP	3 tahun
16	JMW	Konter HP	2 tahun
17	AMR	Pedagang makanan	3 tahun
18	YN	Pedagan ayam	10 tahun
19	KSJ	Pedagang makanan	5 tahun
20	AD	Service elektronik	3 tahun
21	AS	Pedagang makanan	3 tahun
22	RT	Penjual pakaian	6 tahun
23	MD	Pedagang sayur dan buah	6 tahun
24	SP	Pedagang sendal	7 tahun
25	SJB	Pedagang tanaman hias	2 tahun

Tabel 5.1 Data Penerima KUR

Berkaitan dengan banyaknya pertanyaan mengenai prosedur dan ketentuan Suplesi untuk KUR Mikro, maka dapat dijelaskan bahwa sesuai ketentuan yang tercantum pada SE Direksi Nose.S.09-DIR/ADK/03/2010 tanggal 18 Maret 2010, telah ditetapkan bahwa kepada debitur KUR Mikro dapat diberikan suplesi dengan ketentuan “total eksposur pinjaman maksimal Rp. 5.000.000”. Namun demikian, mengingat bahwa saat ini maksimal plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro telah menjadi Rp. 20.000.000 sesuai

ketentuan yang diatur melalui Nofacs Kanpus BRI No.B.146-MKR/KPM/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010, maka Suplesi KUR Mikro dapat diberikan dengan total ekspour menjadi maksimal Rp. 20.000.000.

B. Persyaratan dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Persyaratan Calon Debitur berupa UMKM :

1. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan.
2. Tidak sedang menerima kredit konsumtif (kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kredit konsumtif lainnya).
3. Dalam hal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih memiliki baki debit yang tercatat dalam SIDBI tetapi yang bersangkutan telah melunasi pinjaman, maka diperlukan surat keterangan lunas atau roya dengan lampiran catatan rekening Koran dari Bank pemberi kredit atau pembiayaan sebelumnya.

a. Persyaratan Calon Debitur yang berupa Lembaga *Linkage* :

1. Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang kredit atau pembiayaan dari perbankan.
2. Lembaga *Linkage* tidak sedang memperoleh kredit program dari pemerintah.

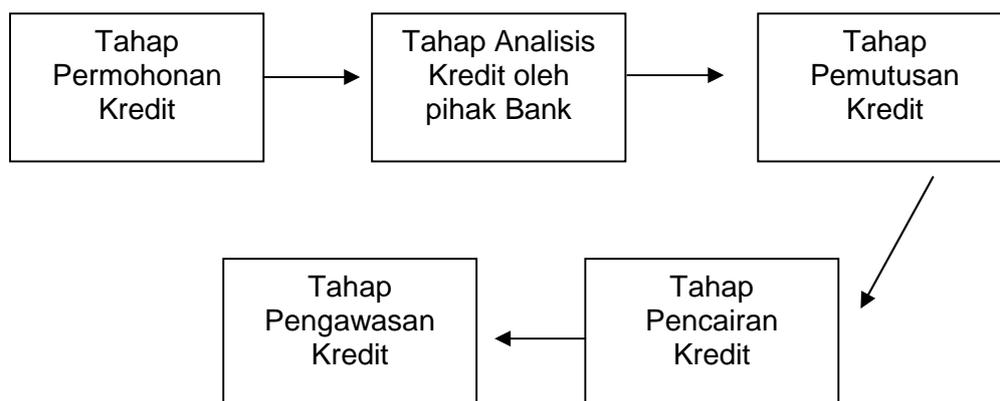
b. Persyaratan Lembaga Keuangan Mikro :

1. Telah memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang.

2. Telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 bulan.
 3. Memiliki pengurus aktif.
 4. Memiliki AD atau ART.
 5. Mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai.
 6. Tidak memiliki tunggakan kredit, baik di BRI maupun di lembaga keuangan lainnya.
- c. Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam :
1. Telah memiliki izin pendirian kegiatan usaha simpan pinjam dari instansi yang berwenang.
 2. Telah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam secara efektif minimal 6 bulan.
 3. Memiliki pengurus yang aktif.
 4. Mempunyai usaha yang layak untuk dibiaya.
 5. Tidak memiliki tunggakan kredit baik di BRI maupun di bank lainnya.
- d. Legalitas Calon Debitur :
1. Individu : identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
 2. Kelompok : surat pengukuhan dari instansi terkait atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Kepala Desa setempat dan Akte Notaris.
 3. Koperasi : anggaran dasar beserta perubahannya.
 4. Badan usaha lainnya : akte pendirian beserta perubahannya.
- e. Perizinan Calon Debitur :
- Untuk kredit dari plafond sampai dengan Rp. 100.000.000, izin usaha seperti TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan surat keterangan izin usaha dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

C. Prosedur Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau.

Adapun pemberian dana Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau untuk calon debitur sebagai berikut :



Gambar 5.1

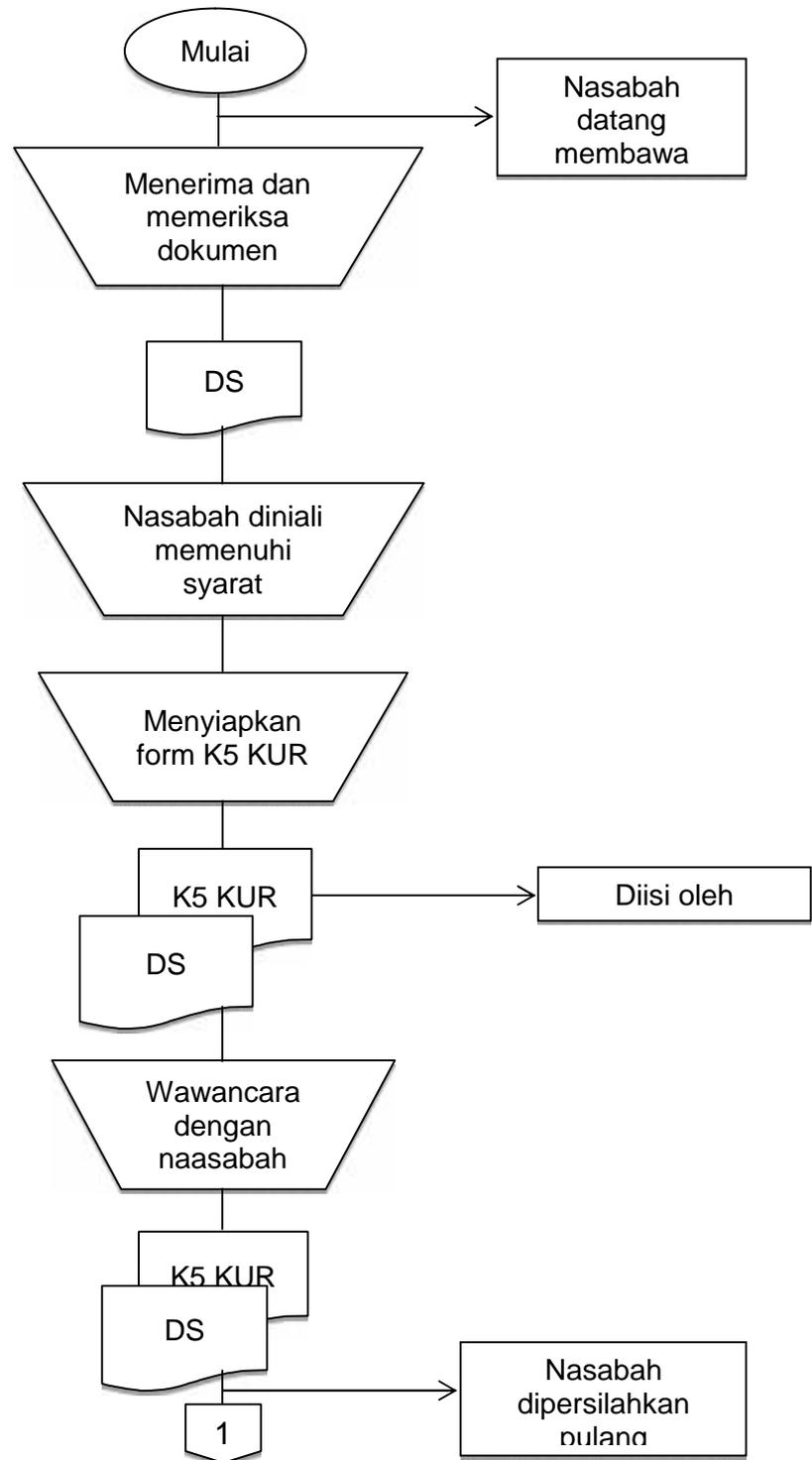
Tahap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Tahap Permohonan Kredit
 - a. Nasabah mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.
 - b. Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir permohonan pengajuan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah :

- 1) Bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK),
- 3) Fotokopi Surat Nikah (bagi yang sudah menikah),
- 4) Foto suami dan istri 3 x 4 masing-masing 1 lembar,
- 5) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Flowchart Sistem Pemberian Kredit
Customer Service



Gambar 5.2 Flowchart Permohonan Kredit

DS : Dokumen Syarat

K5 KUR : Formulir data Nasabah

2. Tahap Analisis oleh pihak Bank

- a. Setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank melakukan wawancara langsung dengan debitur.
- b. Kemudian akan dilakukan tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yang diperiksa oleh mantri (*account officer*). BRI Unit Lalabata Rilau dalam melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.
- c. Penggunaan SID Bank Indonesia (*BI Checking*). Khusus untuk KUR Mikro, pengecekan SID yang semula diwajibkan dirubah menjadi tidak diwajibkan. Namun demikian diharapkan BRI Unit Lalabata Rilau tetap melakukan pengecekan SID ke Bank Indonesia sepanjang tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
- d. Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Lalabata Rilau dalam hal ini Mantri (*account officer*) akan melakukan peninjauan ke lapangan (*on the spot*) tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :
 - 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
 - 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya : tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dan lain-lain. Tujuannya adalah

untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.

3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

e. Hasil survey dirapatkan oleh Mantri (*account officer*) dan Kepala Unit BRI Unit Lalabata Rilau

3. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukan. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Lalabata Rilau akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Pada BRI Unit Lalabata Rilau, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Lalabata Rilau wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :

a. Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.

- b. Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C's *principles*) serta independent.
- c. Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

4. Tahap Pencairan Kredit

Setiap proses pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *Taller* BRI Unit Lalabata Rilau.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap pencairan kredit adalah sebagai berikut:

a. Persiapan pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

1. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KURnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kapasitas tanggal pencairannya.

2. Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang, mengisi kuitansi pencairan Kredit Usaha Rakyat(KUR).

b. Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka CS mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.

c. Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada *teller* dan berkas diserahkan pada *customer service*.

d. Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencarian dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat. Kebijakan dari BRI Unit Lalabata Rilau, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, adapun peminjam kredit untuk plafon kredit dibawah Rp. 50.000.000, jangka waktunya 3 tahun, dengan bunga 1.6%, sedangkan untuk plafon diatas Rp. 50.000.000, jangka waktunya 5 tahun dengan bunga 1%. Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, Bank Rakyat Indonesia Unit hanya memberikan kredit maksimal Rp100.000.000.

D. Sistem Pengawasan Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia unit Lalabata Rilau

Setelah pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak BRI tidak lepas tangan begitu saja, pihak bank tetap melakukan pemantauan (*monitoring*) dan pembinaan kepada nasabah KUR. Tujuan dilakukannya pengawasan kredit adalah agar program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa berjalan sesuai prosedur dan dapat berjalan efektif serta mampu mencapai

target tahunan yang telah ditetapkan saat perencanaan tahunan. Pengawasan lebih banyak dilakukan oleh Kepala Unit dan dibantu oleh masing-masing jabatan yang diberikan dengan program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengawasan kredit dilakukan selama 3 (tiga) minggu pertama setelah pencairan kredit dan selanjutnya *monitoring* dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. *Monitoring* dilakukan dengan tujuan untuk meminilisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah dan kendala yang dihadapi oleh nasabah. *Monitoring* juga dilakukan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Hasil *monitoring* ini dicatat dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Dalam pembayaran kembali kredit yang telah dipinjam, ada batasnya yakni 270 hari, jika sudah melewati batas hari diberikan surat penjaminan yang selanjutnya akan dijamin oleh perusahaan penjamin. Karena adanya pengawasan yang cukup baik serta masing-masing jabatan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, BRI Unit Lalabata Rilau dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016 telah mencapai target nominal.

Berikut kolektibilitas kredit terlihat dari total kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). BRI mampu menjaga kualitas yang ditunjukkan dari rendahnya NPL yang bderada di bawah NPL industri dan jauh di bawah amabang batas NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

Kolektibilitas Kredit

KETERANGAN	2014	2015	2016
Kredit	510.695.481	581.094.544	663.420.218
Lancar	470.087.408	540.359.286	619.793.792
Perhatian Khusus	31.529.860	28.551.212	29.474.869
Kurang Lancar	1.194.328	2.862.971	3.730.004
Diragukan	1.922.321	1.411.066	1.756.805
Macet	5.962.923	7.910.099	8.664.747
NPL	9.079.573	12.184.137	14.151.556
NPL %	1,78%	2,10%	2,13%

Tabel 5.2

Sumber Data : Laporan BRI tahun 2016.

E. Penyebab Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau

Resiko kredit adalah kerugian akibat tidak tertagihnya dana yang telah disalurkan dan kredit yang digolongkan macet adalah kredit tersebut tidak ada kemungkinan tertagih kembalidan pinjaman pokok yang dalam

pengaplikasian kredit termasuk kedalam kredit macet yang kemungkinan akan dihapus bukukan.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau terdapat kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang merupakan kredit bermaslah yang dihadapi perusahaan dan kemungkinan tertagih kredit sangat kecil, oleh karena itu pihak bank harus mengupayakan agar tidak mengalami kerugian.

Penyebab kredit macet yang berasal dari pihak bank, dengan melihat permasalahan yang jelas bahwa ada beberapa komponen sistem pengendalian intern seperti pengawasan, informasi dan komunikasi juga dalam komponen lingkungan pengendalian harus diperhatikan tentang peningkatan karyawan seperti diadakan pelatihan atau pendidikan, juga perlu diperhatikan tentang pemisahan fungsi yang memadai, sehingga setiap karyawan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau yang disebabkan oleh debitur adalah :

- a. Debitur menyalah gunakan kredit yang telah diberikan.
- b. Debitur kurang mampu dalam mengolah kegiatan usaha yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank.
- c. Terdapat pula debitur yang tidak beriktikad baik terhadap kredit yang telah diberikan oleh bank.
- d. Karena bencana alam, gagal panen bagi petani.

Sebelum kredit disalurkan pihak bank lebih menitik beratkan pada penganalisa kredit dengan sebaik-baiknya dan setelah kredit diberikan peranan bank tidak lepas begitu saja pemantauan dan pengawasan

terhadap pengguna kredit lebih ditingkatkan agar gejala awal terjadinya kredit macet dapat diatasi.

F. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau dalam menangani kredit bermasalah (Macet)

Apabila sampai terjadi kredit bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan. Penyelamatan kredit bermasalah tersebut yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau antara lain :

1. Melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga.
2. Nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0,75% dari tunggakan perbulan bagi peminjam diatas Rp. 50.000.000.
3. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu dengan cara :

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di

perpanjang. Misalnya, dari 42 kali menjadi 84 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

4. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

- a. Kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasa.
 - c. Penurunan suku bunga yaitu agar lebih meringankan beban nasabah. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan.
 - d. Pembebasan bunga yaitu pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah yang tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.
5. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etika tidak baik atau sudah tidak mampu lagi membayar semua hutangnya.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemberian dana kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau Watansoppeng untuk calon debitur melalui tahap permohonan kredit yaitu, tahap analisis oleh pihak bank, tahap pemberian putusan kredit dan tahap pencairan kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bigian teller.

Setelah pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pihak BRI tidak lepas tangan begitu saja, pihak bank tetap melakukan pemantauan (*monitoring*) dan pembinaan kepada nasabah KUR. Tujuan dilakukannya pengawasan kredit adalah agar program pemberian kredit usaha rakyat (KUR) bisa berjalan sesuai prosedur dan dapat berjalan efektif serta mampu mencapai target tahunan yang telah ditetapkan saat perencanaan tahunan. Dalam pembayaran kembali kredit yang telah dipinjam, ada batasnya yakni 270 hari, jika sudah melewati batas hari diberikan surat penjaminan yang selanjutnya akan dijaminan oleh perusahaan penjamin. Ada beberapa langkah dalam menangani kredit macet seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya salah satunya adalah melakukan pendekatan personal kepada nasabah, ini dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Salah satu solusi dalam menghadapi kredit bermasalah adalah memperpanjang waktu kredit.

Adanya pengawasan yang cukup baik serta masing-masing jabatan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, BRI unit Lalabata Rilau dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) telah mencapai target nominal. Apabila sampai terjadi kredit bermasalah, maka harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit yaitu telah dihapus bukukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Trisna Hurawati (2013) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif diperoleh bahwa pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Bank BPR Kanaya telah sesuai itu dibuktikan dalam penerapan prinsip 5C dengan

baik sebelum melakukan pencairan kredit. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Pemi Rosalina Hadi (2015) dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif diperoleh bahwa sistem pengendalian intern pada Bank Danamon Cabang Kembar Japur Surabaya itu mengacu pada prosedur-prosedur dalam pemberian kredit untuk mengurangi terjadinya kredit macet. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Amirah Ahmad (2013) berkaitan dengan menggunakan penelitian kualitatif, yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, diperoleh bahwa sistem pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar telah didukung oleh penerapan sistem internal yang sangat efektif. Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Annisa Handayani (2013) dengan menggunakan penelitian deskriptif diperoleh bahwa dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha kecil maupun menengah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) kanwil Surabaya melakukan penguatan dalam pengendalian intern dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pemberian kredit agar mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pemberian kredit. Dari beberapa peneliti terdahulu yang telah penulis kemukakan dapat dikatakan bahwa dari hasil penelitian diatas rata-rata memperhatikan sistem penegndalian intern dalam penyaluran kredit.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau adalah dimulai dari: tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemutusan kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pengawasan kredit.
2. Sistem pengawasan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lalabata Rilau dilakukan selama 3 (tiga) minggu pertama setelah pencairan kredit dan selanjutnya *monitoring* dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali. Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikitnya nasabah yang terkena kredit macet.
3. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau dalam menangani kredit bermasalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga, nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0,75% daritunggakan perbulan bagi peminjaman diatas Rp. 50.000.000,

penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan penyitaan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari skripsi ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penyaluran kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau sebagai berikut :

1. Dalam proses pemberian dana Kredit Usaha Rakyat pada masa yang akan datang, PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau harus mampu menyusun suatu perencanaan yang lebih baik lagi supaya perkembangan kredit dapat lebih ditingkatkan lagi.
2. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang disalurkan dimasa yang akan datang kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau, sebaiknya Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara meningkatkan lagi pelayanan dan memberikan kemudahan-kemudahan yang membuat nasabah merasa nyaman dan terkesan atas pelayanan yang mereka rasakan sewaktu berkunjung ke Bank Rakyat Indonesia Unit Lalabata Rilau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirah, Ahmad. 2013. Tujuan Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Mega Cabang Makassar.
- Annisa, Handayani. 2013. Sistem Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT Bank Negara Indonesia Tbk Kanwil Surabaya.
- Azhar Susanto. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Satu. Bandung : Lingga Jaya.
- Cindi, Aditya. Analisis Efektivitas Pengendalian Intern atas Prosedur Kredit pada PT BPR Shinta Daya Sleman Yogyakarta.
- Claraniken, Dwi Haryani. 2014. Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Pemberian Kredit pada *Credit Union Berora Gratia KK* Yogyakarta.
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Heri Prasetyo. Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Pemberian Kredit. (<http://perpustakaan.uns.ac.id>), Jakarta : Universitas sebelas maret Surakarta.
- Indra Bastian dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Buku I. Jakarta : Salemba Empat
- Kasmir. 2006. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Empat. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- La, Midjan. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi delapan. Bandung : Lingga Jaya
- Malayu SP. Hasibuan. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara

- Marshall dan Paul John terjemahan Dewi dan Deny Arnos. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Sembilan. Jakarta : Salemba Empat.
- Mohammad, Muzamil. 2015. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit pada BRI kota Samarinda.
- Munawarah. Peran Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Buku II. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi tiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Edisi Lima. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nyoman, Trisna hurawati. 2014. Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada PT BPR Kunaya.
- Pramuris, Prismawati. 2014. Analisis Sistem Pengajuan Kredit dan Pengendalian Intern pada PT Bank Bukopin Cabang Surakarta.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Edisi Dua. Bandung : Alfabeta.
- Ruzanna, Aminah. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri Cabbang Majapahit.
- Sri Susilo, dkk. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Satu. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tata Sutabri. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Satu. Yogyakarta : Andi.
- Tjukria P. Tawaf. 1999. *Audit Intern Bank*. Edisi Satu. Jakarta : Salemba Empat.

Pemi, Rosalina Hadi. Sistem Pengendalian Internal pada Bank Danamon
Cabang Kembang Japur Surabaya.

Z Dunil. 2005. *Bank Auditing Risk-Based Audit*. Jakarta : PT Indeks.

RIWAYAT HIDUP



ERMA, lahir di Soppeng Kab Soppeng, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 06 Oktober 1994. Anak keempat dari empat bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Hasan dan Ruhaini. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2000 di SD Negeri 175 Jennae, Kec. Liliraja.Kab.

Soppeng dan tamat pada tahun 2006. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Liliraja. Kab.Soppeng dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan lagi pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Marioriwawo. Kab. Soppeng dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pada Program Strata (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur penerimaan Mahasiswa Baru.

Berkat pertolongan Allah SWT serta iringan do'a dan dukungan dari orang tua, akhirnya perjuangan dan kerja keras penulis terwujud dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan dapat berhasil tersusunnya Skripsi yang berjudul "Anailisis Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Pt. Bank Rakyat Indonesia BRI Tbk Unit Lalabata Rilau Kabupaten Soppeng".